

Analisis Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang

Welli^{1*}, Ardhansyah Putra Harahap²
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian SOP akuntansi pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Adapun subjek penelitian ini yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan yang menjadi objek penelitian yaitu pengawas yang mengelola akuntansi pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang, yang berlokasi di Jl. Komp. Pemdada Deli Serdang No.10, Kabupaten, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dari bulan Maret 2021 sampai dengan September 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntansi pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Keywords: Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Submitted: 8 November 2021; Revised: 15 November 2021; Accepted: 28 November 2021

Corresponding Author: wellywelly935@gmail.com

PENDAHULUAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah instansi yang berkedudukan sebagai organisasi perangkat daerah yang merupakan unsur teknis Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sebagai dinas teknis yang bertanggung jawab dalam pekerjaan konstruksi khususnya bangunan dan gedung pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Basis akuntansi pertanggungjawaban yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA (laporan realisasi anggaran), belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan arus kas serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO (laporan operasional) dan beban dalam neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh data bahwa jumlah penerimaan kas (pendapatan) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran kas (belanja) yang digunakan dalam satu periode akuntansi. Menurut Bapak H. Z. Lubis (Kassubag Keuangan) terjadinya ketimpangan antara penerimaan kas dengan pengeluaran kas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang bukan karena adanya kesalahan dalam pelaporan keuangan, namun sumber penerimaan kas utamanya hanya berasal dari retribusi daerah. Kinerja pelaporan keuangan juga sudah cukup baik karena dalam penyusunan pelaporan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sudah mengikuti panduan standar akuntansi pemerintahan sehingga kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaporan. Berikut akan diuraikan laporan data penerimaan dan pengeluaran kas selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang

No	Tahun	Penerimaan Kas (Rp)	Pengeluaran Kas (Rp)
1	2017	11.300.000	166.235.089.446
2	2018	36.900.000	147.739.035.267
3	2019	82.270.000	191.544.957.624
4	2020	89.520.000	125.848.317.546

Sumber: Data Sekunder (diolah 2021).

Pada Tabel 1.1 tampak bahwa setiap tahunnya penerimaan kas yang diperoleh oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran kas yang digunakan. Pada tahun 2017 penerimaan kas sebesar Rp. 11.300.000 dengan pengeluaran kas sebesar Rp. 166.235.089.446. Tahun 2018 penerimaan kas sebesar Rp. 36.900.000 dengan pengeluaran kas sebesar Rp. 147.739.035.267. Pada Tahun 2019 penerimaan kas

sebesar Rp. 82.270.000 dengan pengeluaran kas sebesar Rp. 191.544.957.624, sedangkan Tahun 2020 penerimaan kas sebesar 89.520.000 dengan pengeluaran kas sebesar Rp. 125.848.317.546. Terjadinya ketimpangan antara penerimaan dengan pengeluaran kas menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang tidak mampu menyeimbangkan penerimaan dengan pengeluaran kas pada periode tertentu. Hal ini juga sekaligus membuktikan belum optimalnya pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2016:35) yang dimaksud dengan akuntansi pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah seperti kabupaten, kota atau wilayah provinsi yang memerlukan. Hasil informasi keuangan yang dilaporkan tersebut bertujuan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal.

Dasar Hukum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Fuad (2016: 5) laporan keuangan oleh pemerintah daerah tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat penting bagi pemerintah dan pihak terkait. Menurut Ramli (2016: 9), pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khusus bagian yang mengatur keuangan negara.
2. Undang-Undang di bidang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah, khusus yang mengatur keuangan daerah.
5. Peraturan perundang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
6. Ketentuan perundang-undang tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan
7. Peraturan perundang-undang lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PSAP No. 1 Tahun 2019 komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*Anggaranary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengertian Kas

Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, wesel pos (kiriman uang lewat pos, *money orders*), dan deposito. Perangko bukanlah merupakan kas melainkan biaya yang dibayar di muka (*prepaid expense*) atau beban yang ditangguhkan (*deferred expense*). Pada umumnya, perusahaan membagi kas menjadi dua kelompok, yaitu uang tersedia di kasir perusahaan (*cas on hand*) dan uang yang tersimpan di bank (*cash in bank*).

Menurut Hery (2014:1) kas merupakan aset yang paling lancar dibanding aset lainnya. Oleh sebab itu, kas merupakan aset yang paling digemari untuk dicuri, dimanipulasi, dan diselewengkan. Untuk mengamankan kas dan menjamin keakuratan (ketepatan penyajian) atas catatan akuntansi kas, pengendalian internal yang efektif atas kas mutlak diperlukan.

Pengendalian Internal atas Penerimaan Kas

Menurut Hery (2014:2) beberapa penerapan prinsip pengendalian internal atas penerimaan kas, yaitu:

1. Hanya karyawan tertentu saja yang secara khusus ditugaskan untuk menangani penerimaan kas.
2. Adanya pemisahan tugas (*segregation of duties*) antara individu yang menerima kas, mencatat/membukukan penerimaan kas, dan menyimpan kas.
3. Setiap transaksi penerimaan kas harus didukung oleh dokumen (sebagai bukti transaksi), seperti slip bertia pembayaran (pengiriman) uang/*remittance advices records* (dalam kasus penerimaan uang lewat konter penjualan/ *counter receipts*), dan salinan bukti setor uang tunai ke bank (*ban slips*).
4. Uang kas hasil penerimaan penjualan harian atau hasil penagihan piutang dari pelanggan harus disetor ke bank setiap hari oleh departemen kasir. Departemen kasir (kepala kasir) akan mengisi formulir setoran bank ini kemudian menyetorkan uang kas tadi ke bank.
5. Dilakukannya pengecekan independen atau verifikasi internal, misalnya saja dalam kasus penerimaan uang lewat konter penjualan, dimana biasanya supervisor akan memverifikasi (mengecek) kebenaran atas jumlah penerimaan kas harian yang telah dihasilkan oleh operator mesin register kas dengan cara mencocokkan antara total catatan register kas dengan total fisik uang kas aktual;

sedangkan bagian keuangan juga akan memverifikasi (mengecek) kebenaran atas jumlah penerimaan kas harian ini dengan cara membandingkan antara salinan lembar kedua dari ringkasan total penerimaan kas harian dengan salinan bukti setor bank.

6. Mengikat karyawan yang menangani penerimaan kas dengan uang pertanggung.

Pengendalian Internal Pengeluaran Atas Kas

Kas mungkin dikeluarkan untuk berbagai tujuan (alasan), seperti untuk membayar beban-beban tertentu (baik sebagai pengeluaran operasional maupun non operasional), untuk membayar utang kepada pemasok, bankir, atau pihak kreditur lainnya, serta bisa juga kas dikeluarkan untuk membeli aset. Pengendalian internal atas pembayaran kas seharusnya memberikan jaminan yang memadai bahwa pembayaran hanya dilakukan untuk transaksi-transaksi yang benar-benar telah diotorisasi dengan semestinya.

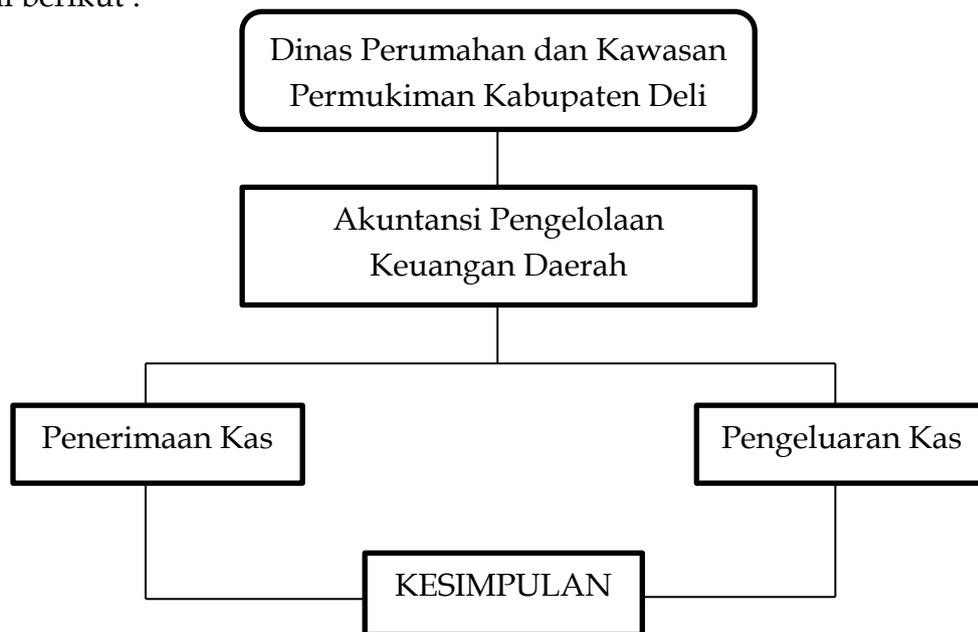
Unsur Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas

Menurut Mulyadi (2017:131) unsur sistem pengendalian intern pengeluaran kas

dirancang dengan merinci unsur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, serta karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya seperti berikut ini:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2016:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi Langsung

Observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas organisasi yang erat kaitanya dengan akuntansi pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data mengenai akuntansi pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang.

3. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen ini dapat berbentuk teks tertulis, artifacts, gambar, maupun foto.

HASIL PENELITIAN

Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Laporan Keuangan Atas Penerimaan Kas Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang

Tabel 2. Rincian Penerimaan Kas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	50.000.000	11.300.000	22,60
2	Pendapatan Transfer	0	0	0
3	Lain-lain pendapatan yang sah	0	0	0
Jumlah		50.000.000	11.300.000	22,60

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2017 (data diolah, 2021).

Realisasi pendapatan SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 11.300.000 merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima bendahara penerimaan SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penerimaan kas diperoleh dari realisasi retribusi penyediaan dan penyedotan Kakus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang 2017 adalah sebesar Rp. 11.300.000 atau sebesar 22,60% dari nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000. Realisasi tersebut tidak mencapai target hal ini disebabkan antara lain:

1. Kendaraan operasional yang digunakan untuk penyedotan kukus hanya 1 (satu) unit.
2. Sebagian warga masyarakat Deli Serdang berdomisili di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Tabel 3. Rincian Penerimaan Kas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	68.500.000	36.900.000	53,87
2	Pendapatan Transfer	0	0	0
3	Lain-lain pendapatan yang sah	0	0	0
Jumlah		68.500.000	36.900.000	53,87

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2018 (data diolah, 2021).

Realisasi pendapatan SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 36.900.000 merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima bendahara penerimaan SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penerimaan kas diperoleh dari realisasi

retribusi penyediaan dan penyedotan Kakus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang 2018 yaitu sebesar Rp. 36.900.000 atau sebesar 53,87% dari nilai anggaran sebesar Rp. 68.500.000. Realisasi tersebut tidak mencapai target hal ini disebabkan antara lain:

1. Kendaraan operasional yang digunakan untuk penyedotan kukus hanya 3 (satu) unit.
2. Sebagian warga masyarakat Deli Serdang berdomisili di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Tabel 4. Rincian Penerimaan Kas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	68.500.000	83.270.000	121,56
2	Pendapatan Transfer	0	0	0
3	Lain-lain pendapatan yang sah	0	0	0
Jumlah		68.500.000	83.270.000	121,56

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2019 (data diolah, 2021).

Realisasi pendapatan SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 83.270.000 merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima bendahara penerimaan SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penerimaan kas diperoleh dari realisasi retribusi penyediaan dan penyedotan Kakus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang 2019 yaitu sebesar Rp. 83.270.000 atau sebesar 121,56% dari nilai anggaran sebesar Rp. 68.500.000. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan hal ini disebabkan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan daerah kabupaten Nomor 04 tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Terbentuknya UPTD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019.
3. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang.
4. Ikut sertanya peran pihak swasta yang menyediakan Jasa Sedot Tinja An. CV. Kita Mandiri, Jalan Grijiya lingkungan 2 Nomor 48, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa.

Tabel 5. Rincian Penerimaan Kas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	68.500.000	36.900.000	133,69
2	Pendapatan Transfer	0	0	0
3	Lain-lain pendapatan yang sah	0	0	0
	Jumlah	68.500.000	36.900.000	133,69

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2020 (data diolah, 2021).

Realisasi pendapatan SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 36.900.000 merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima bendahara penerimaan SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penerimaan kas diperoleh dari realisasi retribusi penyediaan dan penyedotan Kakus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang 2020 yaitu sebesar Rp. 36.900.000 atau sebesar 133,69% dari nilai anggaran sebesar Rp. 68.500.000. Realisasi tersebut melebihi dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan daerah kabupaten Nomor 04 tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Terbentuknya UPTD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019.
3. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang.
4. Ikut sertanya peran pihak swasta yang menyediakan Jasa Sedot Tinja An.
CV. Kita Mandiri, Jalan Griliya lingkungan 2 Nomor 48, Kelurahan PekanTanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa.

Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Laporan Keuangan Atas Pengeluaran Kas Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang

Pengeluaran kas adalah semua pengeluaran dari rekening kas bendahara pengeluaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

PEMBAHASAN

Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Penerimaan Kas

Berdasarkan hasil analisis data pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan kas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang serta hasil perbandingan dengan standar akuntansi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ditemukan bahwa pengelolaan laporan keuangan penerimaan kas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum. Akuntansi pengelolaan keuangan atas penerimaan kas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang juga sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut sesuai dengan pengertian pendapatan dalam akuntansi pelaporan keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang yang menyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Sehingga hasil analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan kas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pengeluaran Kas

Berdasarkan hasil analisis laporan pengelolaan keuangan daerah atas pengeluaran kas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dengan melakukan perbandingan dengan standar akuntansi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ditemukan bahwa laporan pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan kas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang telah mengikuti pedoman standar akuntansi pemerintah yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 dijelaskan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. pengertian tersebut sejalan dengan pengertian dalam akuntansi pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dimana belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Dari 8 poin yang diuraikan pada tabel tersebut diatas secara keseluruhan telah mengikuti standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akuntansi pengelolaan keuangan atas pengeluaran kas Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli serdang

telah sesuai dengan dengan standar akuntansi pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya sehingga penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntansi pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan kas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah.
2. Akuntansi pengelolaan keuangan atas pengeluaran kas Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli serdang telah sesuai dengan dengan standar akuntansi pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah.

UCAPAN TERIMA AKSIH

Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Swt, atas nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Kepada keluarga saya terutama kedua orang tua tercinta, abang dan adik tersayang. Kepada ibu Pembimbing Bapak Ardhansyah Putra Harahap, S.Pd, M.Si yang telah mengarahkan pembuatan makalah ini, rekan-rekan akuntansi dan pihak- pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian makalah ini yang tidak dapat disebut satu per satu.

REFERENSI

- Agustyawati, Dwi. (2019). "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2(1), pp.
- Anshori, Muslich dan Iswati, Sri. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Cet. 1*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Elsye, Rosemery (2016). *Akuntansi Akruwal Pemerintahn Daerah*. Bogor: Ghalia.
- Erlina., Rambe, O.S., dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akruwal*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitriyana. (2017) "Analisis Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Menurut Perspektif Syari'ah Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis)", *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 1(3), pp. 106-141.

- Fuad, Muhammad Ramli . (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia.
- Halim, Abdul. (2016). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. (2014). *Akuntansi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hutaheam, Roni Golda Meir dan Winata, Edi. (2020). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan. *Jurnal Studi Manajemen*, Vol. 2, No. 2, p.71-77.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi. Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba.
- Patiroi, Andi. (2020) „Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah“, *Jurnal Economic Resource*, 2(2), pp. 87–101.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyajian Laporan Keuangan
- Rasmi, Dewi (2018) „Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Kampung (Studi Empiris pada Distrik Sentani Kabupaten Jayapura)“, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(1), pp. 83–95.
- Ratela, Steven R. (2015) „Analisis Akuntansi Atas Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara“, *Jurnal EMBA*, 3(4), pp. 269–276.
- Rondonuwu, Clarissa Bellinda., Ilat, Ventje., dan Runtu, Treesje. (2020). Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 2020, pp. 316-323
- Samryn L. M. (2015). *Pengantar Akuntansi: Metode Akuntansi untuk Elemen Laporan Keuangan Diperkaya dengan Perspektif IFRS & Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.